

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan baik, maka dari itu pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Wati *et al.*, 2014: 1) sehingga dari publikasi laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan media yang digunakan oleh entitaster khusus pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan (publik). Dari perspektif rakyat di daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan SAP dapat menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola keuangan dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah merevisi standar akuntansi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuanganya itu PP 71 tahun 2010 menggantikan PP No.24 tahun 2005. Dalam perubahan tersebut, standar akuntansi

pemerintahan yang dulu berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) akan berubah menjadi berbasis akrual (*Accrual Basic*). Diharapkan dari perubahan penerapan SAP berbasis akrual tersebut dapat memperbaiki permasalahan umum yang terjadi di instansi pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan yang buruk. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibidang pengelola keuangan. SDM harus memiliki kompetensi dibidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik namun sudah jadi permasalahan umum yang terjadi di pemerintahan khususnya pemerintah daerah bahwa untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia, seringkali yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Nurillah, 2014: 9). Sehingga diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka dibutuhkan bukan hanya jumlah sumber daya manusia melainkan kompetensi yang dimiliki SDM tersebut. Sumber daya manusia juga harus menguasai teknologi informasi (TI) demi mencapai tujuan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada tiap entitas baik sektor swasta maupun

pemerintahan tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan TI pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Rahadi (2007: 11) menyatakan bahwa TI mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga serta nilai informasi yang tidak didukung dengan pemanfaatan teknologi, akan menghambat dalam memenuhi karakteristik kualitatif berupa ketepatanwaktuan dan juga dalam rangka pengambilan keputusan.

Hal ini Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami teknologi dan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman (2009: 17) dalam Ramadhan (2015: 3) yaitu untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh sdm yang berkompeten dan menguasai teknologi informasi. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi pemerintah membutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan

bahwa pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah (Armando, 2013: 2).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya 13.567 permasalahan senilai Rp 8,97 triliun selama pelaksanaan pemeriksaan laporan pada semester I 2020. Temuan ini merupakan ringkasan dari 634 laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan, 7 LHP kinerja, dan 39 LHP dengan tujuan tertentu. Jumlah tersebut meliputi 6.713 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 6.702 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 8,28 triliun. (dikutip dari antaranews.com)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus meningkat dari 3 LKPD (0,65%) pada tahun 2006 menjadi 411 LKPD (76%) pada tahun 2017. Peningkatan kualitas LKPD pada 2017 merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kelemahan yang terjadi pada tahun 2016. Upaya yang dilakukan antara lain pemuktahiran data aset tetap, inventaris ulang aset tetap tanah, gedung, bangunan, serta penyeteroran dan pemulihan nilai pertanggungjawaban belanja barang dan jasa ke kas daerah. Pada semester I tahun 2018, BPK memeriksa 542 (100%) LKPD tahun 2017. Atas LKPD tersebut, 411 LKPD memperoleh opini WTP, 113 LKPD mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 18 LKPD mendapat

opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Dari 34 pemerintah provinsi, sebanyak 33 LKPD (97%) memperoleh opini WTP dan 1 LKPD (3%) mendapat opini WDP. Dari 415 pemerintah kabupaten, sebanyak 298 LKPD (72%) mendapat opini WTP dan 99 LKPD (24%) dengan opini WDP. Sedangkan dari 93 pemerintah kota, sebanyak 80 LKPD (86%) memperoleh opini WTP dan 13 LKPD (14%) dengan opini WDP (dikutip dari website BPK RI bpk.go.id).

Pemerintah Kota Mataram menerima piagam penghargaan dan plakat atas laporan keuangan pengelolaan keuangan negara dengan pencapaian opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 6 kali berturut-turut. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi yang kuat kepada OPD dan BPKAD serta semua unsur dalam mengelola keuangan dengan baik (dikutip dari website insidelombok.id)

Melihat kondisi tersebut menjelaskan bahwa Kota Mataram yang telah mendapat WTP 6 kali berturut-turut perlu diketahui faktor apa saja yang melatarbelakangi opini tersebut, ditambah lagi oleh BPK RI bahwa sistem pengendalian intern belum berjalan dengan baik di pemerintah daerah yang mungkin juga dapat terjadi di Kota Mataram dan masih terjadi penyalahgunaan anggaran dan kecurangan lainnya. Dari kondisi ini harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengendalian intern. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan judul penelitian ini yaitu **Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *kompetensi sumber daya manusia* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram?
2. Apakah *sistem pengendalian intern* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram?
3. Apakah *pemanfaatan teknologi informasi* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai media pembelajaran dalam pengaplikasian pada pemerintah daerah mengenai kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengaruh kualitas laporan keuangan yang diharapkan dapat menjadi referensi untuk memahami system pemerintah daerah yang

diduga akan berdampak dan menjadi acuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan hal tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi dunia akademisi (khususnya dalam bidang pendidikan akuntansi) dalam mendidik dan mendiskusikan mengenai pentingnya kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan
- b. Sebagai sarana informasi bagi masyarakat tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat memberikan kontribusi positif untuk pengembangan dan perbaikan diri kearah yang lebih baik.
- c. Memberikan masukan bagi instansi daerah agar dapat lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah mereka melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi yang optimal dan diperkuat sistem pengendalian intern yang memadai.

